

**DINAMIKA KONFLIK AKTOR DALAM PEREBUTAN JABATAN KETUA  
DPD II PARTAI GOLKAR (GOLONGAN KARYA) DI KABUPATEN  
ROKAN HULU TAHUN 2017**

**Oleh :**

**Ade Permana**

[Adepermana955@gmail.com](mailto:Adepermana955@gmail.com)

**Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293  
Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*This is the party Golkar that as long history in Indonesia where shortly earlier named the Secretariat With Golongan Karya and this party that do this is the party ruler when the New Order. A long journey the party Golkar never be prevented from dynamics internal conflicts, in Rokan Hulu regency, internal conflicts happened in DPD II Golkar Rokan Hulu regency, where the conflict began since the establishment of the head of the Golkar Rokan Hulu namely Suparman by the corruption eradication commission (KPK) on 7 June 2016 on suspicion of embezzlement the draft (RAPBD) of riau year 2014-2015, the party Golkar management command a vacuum in the position of the head DPD II Golkar Rokan Hulu because Suparman being held by the KPK, and remember office Suparman also has been completed in early of the year 2017. To fill vacancy of the head the party Golkar Rokan Hulu, and it is Musda in different times and places on 8 January 2017 and 7 February 2017, the race position will not could be avoided between Sari Antoni and Nono Patria Pratama, because the position of the head Golkar in Rokan Hulu regency is very strategic, the party is the winner second in Pileg 2014 and winners of the election Pilkada in Rokan Hulu regency of the year 2015.*

*The formulation of a problem in this research was "How of the dynamics of conflict in DPD II Golkar Rokan Hulu regency of the year 2017". The purpose of this research is to find the dynamics of conflict for Golongan Karya (GOLKAR) 2017 in DPD II Golkar Rokan Hulu regency of Riau.*

*This research result indicates that conflict in internal the party Golkar Rokan Hulu is because the race as the head of DPD II the party Golkar Rokan Hulu between Sari Antoni and Nono Patria Pratama, because the position of the head Golkar in Rokan Hulu strategic. This conflict are part conflict the surface and conflict resolution by means of Non Zero Sum Game.*

**Keyword: The party Golkar, Dynamics of Conflict**

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Partai politik adalah alat perjuangan masyarakat untuk menduduki pemerintahan, dimana anggota-anggotanya terorganisir dan terbentuk dari pandangan mengenai nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Salah satu indikator dari negara demokrasi adalah partai politik dan pemilu. Partai politik kemudian didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (Politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.<sup>1</sup> Keberadaan partai politik sangat penting untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Melalui partai politik, dilakukan rekrutmen politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Partai politik terbentuk karena adanya ideologi yang sama, namun dalam pelaksanaannya ideologi yang sama tidak cukup untuk membentuk sebuah partai. Hal tersebut karena sesungguhnya di dalam sebuah partai masih terdapat perbedaan orientasi, cita-cita, nilai dan kehendak masing-masing individu. Inilah salah satu yang menjadi penyebab munculnya konflik dalam tubuh partai yang saat ini banyak terjadi. Konflik tidak bisa dihindari karena sejauh berdirinya partai pasti banyak terdapat kepentingan-kepentingan pribadi yang berbeda satu sama lain.

Menurut undang-undang No. 2 Tahun 2011 pasal 1 tentang partai politik, definisi partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di

bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga politik, partai bukan dengan sendirinya ada, kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Namun bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, dan jauh lebih muda dengan organisasi Negara. Serta baru ada di negara modern.<sup>2</sup>

Menurut Miriam Budiardjo setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.<sup>3</sup>

Monte Palmer mengatakan bahwa fungsi parpol di negara berkembang adalah menyediakan dukungan basis massa yang stabil, sarana integrasi dan mobilisasi, dan memelihara kelangsungan kehidupan politik.<sup>4</sup>

Dalam sistem negara demokrasi, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satunya yaitu sebagai manajemen konflik. Namun dalam konteks partai politik di

<sup>1</sup> Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi)*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. hlm.67

<sup>2</sup> Miriam. Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia. hlm.367

<sup>3</sup> Ibid. Miriam Budiardjo. hlm. 408

<sup>4</sup> Sebagai mana dikutip dari website : <http://avivsyuhada.wordpress.com/2012/02/23/fungsi-partai-politik/>. Diakses pada tanggal 6 maret 2018, pukul 15:00 WIB

Indonesia, fungsi ini tidak bisa dilakukan, karena hampir semua partai politik, baik yang besar maupun yang kecil, tidak pernah terlepas dari konflik yang terjadi didalam dirinya sendiri. Konflik internal merupakan sebuah problematika tersendiri didalam sebuah organisasi, khususnya partai politik. Hal ini dikarenakan konflik internal akan menghambat kinerja dan laju perjalanan partai politik yang bersangkutan dalam persaingan dengan partai lainnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konflik internal akan menjadikan partai politik semakin keropos secara organisasi dan mengakibatkan tidak terlaksananya program partai tersebut.

Konflik dalam perpolitikan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, konflik yang terjadi pun beraneka ragam, salah satunya yang kerap terjadi di Indonesia adalah konflik-konflik internal di dalam partai politik, partai politik yang merupakan wadah bertemunya banyak kepentingan sudah tentu rawan terjadinya konflik.

Salah satu konflik Partai Golkar yang pernah ada adalah Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IX yang berlangsung di Bali dan yang satunya berlangsung di Jakarta. Munas partai Golkar terjadi di tempat dan waktu yang berbeda serta memberikan hasil struktur kepengurusan yang berbeda pula. Dimana pada Munas Bali pada 30 November – 4 Desember 2014 memilih Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan pada Munas Jakarta pada 6-8 Desember 2014 memilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar, Konflik Partai Golkar memanas pasca hasil pemilihan Presiden (PILPRES) 2014, dimana Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta kalah dari pasangan Jokowi-JK, melihat hasil Pilpres tersebut sebagian

kader Golkar menginginkan Partainya bergabung bersama pemerintahan terpilih, sedangkan sebagian lagi tetap menginginkan bahwa partai Golkar berada di luar pemerintahan, hal ini membuat partai beringin ini terbelah, tak hanya ditingkat Pusat dua kubu kepengurusan ini juga merembes ke kepengurusan yang ada di Daerah baik itu DPD I dan DPD II Golkar yang ada di daerah-daerah, salah satunya adalah DPD I Golkar Provinsi Riau.

Konflik internal Partai Golkar tentunya membawa dampak yang cukup besar terhadap perpolitikan di Indonesia terutama untuk Partai Golkar yang berada di daerah Provinsi maupun yang berada di daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Tentunya dampak konflik ini juga sangat dirasakan di Provinsi Riau, mengingat Partai Golkar adalah Partai pemenang pemilu legislatif 2014 maupun Pilkada 2013 di tingkat Provinsi di Riau, dampak tersebut dirasakan baik dalam hal menjalankan kegiatan internal dan eksternal, kegiatan program kerja, pengambilan keputusan, struktur keorganisasian maupun pemicu untuk timbulnya konflik Partai Golkar yang ada di Provinsi Riau.

Konflik Partai Golkar tak hanya dirasakan di tingkat kepengurusan pusat yaitu DPP Golkar dan tingkat Provinsi yaitu DPD I Golkar, namun konflik-konflik juga terjadi di tingkat Kabupaten atau Kota, seperti konflik yang terjadi di DPD II Golkar Kabupaten Rokan Hulu, dimana konflik bermula semenjak ditetapkannya Suparman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 7 Juni 2016 atas dugaan kasus suap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau 2014-2015, dimana Suparman juga merupakan Ketua DPD II partai Golkar

Kabupaten Rokan Hulu, Kepemimpinan Partai Golkar pun terjadi kekosongan pada posisi Ketua DPD II Golkar Rokan Hulu karena Suparman ditahan oleh KPK, dan mengingat jabatan Suparman juga sudah berakhir pada awal tahun 2017. Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Partai Golkar Rokan Hulu tersebut, maka pada tanggal 8 Januari 2017 di Hotel Sapadia terselenggaralah Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-IV Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu, dimana Musda tersebut bertujuan untuk melakukan penyelamatan Partai.

Musda yang diselenggarakan di hotel Sapadia tersebut dibuka oleh korwil Partai Golkar Riau yaitu Idris Laena dan Musda tersebut menghasilkan Sari Antoni secara Aklamasi sebagai Ketua Golkar DPD II Kabupaten Rokan Hulu sebagai pengganti Suparman, dan Musda tersebut memiliki SK (Surat Keputusan) yang sah dan legal, Akan tetapi sebagian pihak menganggap musda ini tidak sah karena tidak adanya persetujuan dari DPD I Golkar Riau, dan sebagian pihak tersebut tidak menerima hasil Musda tersebut. Dan tak lama setelah itu DPP Golkar mengeluarkan Surat Keputusan untuk menganulir Musda Ke IV Golkar yang Memilih Sari Antoni tersebut, dengan Surat Keputusan yang baru tersebut DPP Partai Golkar menunjuk Masnur sebagai Ketua Plt Golkar Kabupaten Rokan Hulu melalui surat keputusan Nomor KEP-202/DPP/GOLKAR/1/2017.

Masnur yang ditunjuk oleh DPP Partai Golkar sebagai Plt melaksanakan Musda ke-IV Partai Golkar yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2017 di Hotel Netra dan menghasilkan Nono Patria Pratama sebagai Ketua DPD II Golkar Kabupaten Rokan Hulu. Meski Musda Ulang sudah dilakukan namun Konflik belum berakhir karena

dua kubu belum juga saling mengakui satu sama lain, dan tak berhenti disitu, pada tanggal 23 Februari 2017 Ketua Golkar sebelumnya yakni Suparman kembali bebas, dan setelah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN TIPIKOR) Pekanbaru, Konflik pun terus berlanjut dengan kembali dilaksanakannya Musda ulang Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu di Hotel Grand Elite pada tanggal 4 November 2017, yang mana bertujuan untuk mengakhiri dualisme kepengurusan Partai Golkar Rokan Hulu antara kubu Sari Antoni dan Nono Patria Pratama, namun tak seperti yang diharapkan kedua kubu tidak bisa membuat kesepakatan dan situasi berakhir buntu, Ketua DPD I Partai Golkar Riau Arsyadjuliandi Rahman pun mengambil keputusan yakni dengan mengangkat Suparman sebagai Carateker/Plt Ketua DPD II Partai Golkar Rokan Hulu dan disetujui juga oleh Perwakilan Mahkamah Partai Yang Hadir pada saat itu.

Artinya dengan keputusan tersebut membuat dua kubu, yaitu Kubu Sari Antoni hasil Musda Hotel Sapadia dan Nono Patria Pratama hasil Musda Hotel Netra tidak berlaku lagi. Tugas Suparman sebagai Plt Ketua DPD II Golkar Rokan Hulu akan berakhir sampai terpilihnya Ketua DPD II Golkar Rokan Hulu yang definitif. Namun belum sempat melaksanakan tugas sebagai Plt Ketua Golkar untuk melaksanakan Musda, pada tanggal 11 November 2017 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Suparman yang sebelumnya di Vonis bebas di PN TIPIKOR Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2017, pada tanggal 6 Desember 2017 KPK melakukan eksekusi penahanan terhadap Suparman dilapas sukamiskin, ia harus menjalani

hukuman 4,5 Tahun penjara. Selang waktu kurang lebih satu atau dua bulan Suparman di penjara, Musda Golkar tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran Suparman sebagai Plt mengingat dirinyapun sudah di penjara, Musda tersebut dilaksanakan Pada tanggal 28 Febuari 2018 di Hotel Pangeran Pekanbaru, Musda berlangsung singkat karena semua PK (Pimpinan Kecamatan) Partai Golkar Rokan Hulu satu suara dan memilih Sari Antoni Sebagai Ketua DPD II Golkar Rokan Hulu, dan Sari Antoni pun terpilih secara Aklamasi, Musda tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPD I Golkar Riau Arsyajuliandi Rachman dan dihadiri oleh perwakilan Mahkamah Partai Golkar.

Kesepakatan dan penyelesaian konflik sebaiknya diselesaikan dengan mekanisme internal sesuai AD/ART Partai yang merupakan suatu hal atau langkah yang sangat baik ketimbang untuk tetap terus berseteru di jalur hukum, potensi saling gugat menggugat soal keabsahan pengurus bisa terus berlanjut dan ini bisa menjadi kerugian besar dalam perjalanan sebuah Partai politik kedepan termasuk Partai Golkar, kinerja pengurus yang duduk di bangku legislatif bisa terganggu, demikian juga halnya dengan pengurus ataupun kader yang memegang jabatan eksekutif, karena pengurus atau kader partai hanya akan disibukan dengan kubu-kubuan.

Namun, kekhawatiran itu berbanding lurus dengan kondisi empirik yang ada di daerah. Banyak kepengurusan partai ditingkat daerah mengalami konflik internal. Salah satu yang patut disoroti adalah konflik internal kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah tingkat dua (DPD II) Partai Golkar di Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan fenomena fenomena yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dan mengetahui lebih jauh tentang mekanisme pergantian Kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu, serta mendeskripsikannya dalam bentuk penulisan proposal dengan judul :

### **“DINAMIKA KONFLIK AKTOR DALAM PEREBUTAN JABATAN KETUA DPD II PARTAI GOLKAR (GOLONGAN KARYA) DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017”**

#### **B. Rumusan Masalah**

“Bagaimanakah Dinamika Konflik Perebutan Jabatan Di DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017?”

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan ini adalah Untuk mengetahui Dinamika Konflik Partai Golongan Karya (GOLKAR) Tahun 2017 di DPD II Golkar Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

##### **2. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

###### **a. Manfaat Subjektif**

Sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah

###### **b. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan mengenai Dinamika Konflik Partai Golongan Karya (GOLKAR) Tahun 2017

###### **c. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi lembaga-lembaga dan semua pihak yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian

pada bidang yang sama pada masa yang akan datang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Studi Terdahulu**

###### **a. Skripsi**

###### **b. Jurnal**

###### **c. Teori**

##### **1. Dinamika Konflik**

Dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Sehingga dinamika memiliki arti ilmu yang mempelajari dan mengandung arti sebuah kekuatan yang selalu bergerak dan berkembang untuk dapat menyesuaikan diri pada suatu keadaan sesuai dengan gaya penyebabnya.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Taquiri, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara berterusan.<sup>6</sup>

Umumnya ada lima strategi untuk menyelesaikan konflik yaitu dominasi, akomodasi, penghindaran, kerja sama dan pengabungan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Sebagaimana dikutip dari website: <http://blogdwi19.blogspot.co.id/2015/01/dinamika-konflik-dalam-organisasi.html?m=1>. Diakses pada tanggal 2 maret 2018, pukul 23:00 WIB

<sup>6</sup>Rusdiana, H. A. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung. CV Pustaka Setia. hlm. 68

<sup>7</sup>Denny hidayat dkk. 2005. *Manajemen Konflik Stakeholders Delta Mahakam*. Jakarta. Dany Jaya Abadi. hlm 17

## **2. Konflik**

Konflik dapat diartikan sebagai situasi pada saat para aktor menggunakan perilaku konflik melawan satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan yang bersebrangan atau mengekspresikan naluri permusuhan<sup>8</sup>.

Konflik atau polemik dalam setiap peristiwa politik berakar pada perebutan kekuasaan, sebab itu kekuasaan merupakan salah satu kunci untuk melihat lebih jauh sumber-sumber konflik yang terjadi. Menurut webster, istilah "*conflict*" di dalam bahasa aslinya suatu "perkelahian, perperangan atau perjuangan" yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.<sup>9</sup> Selain itu, Konflik juga dapat diartikan sebagai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak berkonflik tidak dapat dicapai secara stimulan.<sup>10</sup>

### **2.1 Sumber-sumber Konflik**

Menurut Robbins, Konflik terjadi karena ada yang melatarbelakanginya. Kondisi tersebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori yaitu :

1. Komunikasi
2. Struktur
3. Pribadi/Individu

### **2.2 Konflik Politik**

Konflik Politik adalah perselisihan atau pertentangan antar tokoh politik, pengurus partai atau pimpinan lembaga yang mengakibatkan ketidak harmonisan dan dirasakan akibatnya oleh masyarakat.

---

<sup>8</sup> Rusdiana, H. A. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung. CV Pustaka Setia. hlm. 68

<sup>9</sup> Op.cit. Pruit Dean G, dan Rubin Jeffery z. hlm 9

<sup>10</sup> Ibid. Pruit Dean G, dan Rubin Jeffery z. hlm 10

### 2.3 Bentuk-Bentuk Konflik

Menurut Fisher, pola konflik dibagi ke dalam tiga bentuk sebagai berikut:

1. Konflik Laten
2. Konflik Manifest (terbuka)
3. Konflik Permukaan

### 2.4 Penyelesaian Konflik

Menurut pendapat Mc Farland ada dua cara penyelesaian konflik yaitu:

1. Zero Sum Game
2. Non Zero Sum Game

### 3. Partai Politik

Partai Politik berangkat dari suatu anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan demikian pengaruh mereka lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.<sup>11</sup>

Sedangkan secara umum, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>12</sup>

#### 3.1 Fungsi Partai Politik

Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melenggangkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua partai politik juga

mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi. Di sini peran dan fungsi organisasi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara.<sup>13</sup>

### 4. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.<sup>14</sup>

#### 4.1 Sumber-Sumber Kekuasaan

Sumber-sumber kekuasaan, yaitu kekuasaan mempunyai aneka macam bentuk dan bermacam-macam sumber. Hak milik kebendaan merupakan sumber kekuasaan, birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan. Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana, dalam hubungan sosial maupun di dalam organisasi-organisasi sosial. Selain itu, sumber kekuasaan juga terdapat pada perasaan tidak puas (mereka yang diperintah) mempunyai pengaruh terhadap kebijaksanaan.<sup>15</sup>

#### E. Kerangka Berpikir

#### F. Definisi Konseptual

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif, jenis deskriptif. Pada prinsipnya dalam metode kualitatif ini, peneliti harus terjun langsung menjadi partisipasi aktif bersama responden. Walaupun demikian peneliti harus ingat dan sadar bahwa peneliti berbeda posisi dengan responden, sehingga dituntut tetap selalu konsisten. Untuk itu tingkat objektivitas bagi peneliti harus tetap selalu terjaga, dengan cara mencatat data dan fakta, tanpa cepat membuat interpretasi. Pada dasarnya, metode-metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sekaligus adalah

<sup>13</sup> Op.Cit. Firmanzah. hlm 7

<sup>14</sup> Ibid. Miriam Budiardjo, hlm 17-18

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto.2013,*Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta:Rajawali Press.hlm230-231

<sup>11</sup> Op.cit. Miriam Budiardjo. hlm 403

<sup>12</sup> Ibid. Miriam Budiardjo. hlm 403-404

metode analisis data, karena itu setelah data dikumpulkan maka sesungguhnya peneliti sudah menganalisis datanya.<sup>16</sup>

Sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan sosial. Jaringan sosial adalah sumber pengetahuan yang menjadi dasar utama dalam kepercayaan strategi. Melalui jaringan orang saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, saling membantu dalam melaksanakan atau mengatasi suatu masalah. Jaringan sosial juga merupakan suatu jaringan Dimana ikatan yang menghubungkan satu titik ketitik yang lain dalam jaringan adalah hubungan sosial.<sup>17</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan mendeskripsikan keadaan subjek dan objek.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini beralokasi di DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu. Alasan menetapkan DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu sebagai lokasi Penelitian adalah karena di DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu ini sendiri adalah tempat terjadinya konflik kepengurusan partai Golkar di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017.

### **3. Jenis Data**

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah Informen, Informen adalah orang yang menjadi sumber data didalam penelitian yang berhubungan

langsung dengan permasalahan dan mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti. Penentuan Informen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposif*. Teknik *Purposif* adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informen sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>18</sup>

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

### **6. Teknik Analisis Data**

Semua teknis adalah analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan (wawancara,observasi) melalui tradisi teknik analisis data tersebut.<sup>19</sup>

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Profil Partai Golongan Karya**

##### **2.1 Sejarah Pembentukan Partai Golongan Karya (Golkar)**

Golongan Karya (Golkar) memiliki akar sejarah yang panjang dalam perpolitikan indonesia. Dengan semangat membendung pengaruh Partai Komunis (PKI) dan dalam rangka pelaksanaan UUD 1945, maka golongan-golongan fungsional yang tidak tergabung dalam partai politik dan dengan dukungan TNI berjuang keras untuk memformalkan kehadirannya

<sup>16</sup> Burhan Bungin,2007.*Penelitian Kualitatif*,Jakarta:Pranada Media Grup. Hlm 79

<sup>17</sup>ibid. hlm. 62

<sup>18</sup> Op.cit Burhan Bungin. hlm 107

<sup>19</sup> Ibid. Burhan Bungin. hlm 79

ditengah masyarakat. Melalui perjuangan yang ulet dan terus menerus dari golongan fungsional, berdasarkan peraturan Presiden No. 12 Tahun 1959 diangkatlah 200 wakil-wakil Golongan Karya Di MPRS. Kemudian dengan Keputusan Presiden N. 193 1964 diakuilah wakil-wakil Golongan Karya di Front Nasional. Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Fron Nasional, maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya (SEKBER GOLKAR). Pada tanggal 20 Oktober 1964.

Seiring perkembangannya, pada suatu rapat kerja Sekber Golkar pada tahun 1966 melalui sambutan tertulisnya Jendral Soeharto menyerukan agar Golkar mempunyai *sense of mission*, memngembangkan dan memiliki kesadaran bulat bahwa Golkar mempunyai cita-cita, tuuan tunggal, yakni pengabdian yang didasarkan oada patriotisme yang berkiblat pada UUD 1945 dan Pancasila.

Berbeda dengan parpol lain, Golkar tidak didirikan berdasarkan ideologi tertentu tetapi berorientasi kepada program yakni pembangunan itu sendiri.<sup>20</sup>

## **2.2 Partai Golongan Karya Pada Era Reormasi**

## **2.3 Paradigma Baru Partai Golongan Karya**

## **2.4 Proses Retkruitmen Politik, Membuat Kebijakan Dan Program Partai Golongan Karya**

## **2.5 Tujuan, Visi, Misi, Ideologi, Doktrin, Dan Organisasi Terkait Partai Golongan Karya**

## **B. Gambaran Umum DPD II Partai GolKar Kabupaten Rokan Hulu**

Partai Golkar Rokan Hulu Adalah salah satu Partai besar Yang ada Di kabupaten Rokan Hulu dimana Pada Pemilihan legislatif (Pileg) 2014, Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu berhasil menjadi Pemenang Kedua dan mendapatkan Tujuh Kursi di DPRD Kabupaten Rokan hulu. Tak hanya sampai disitu Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu juga Menjadi Pemenang Dalam Pilkada serentak Tahun 2015, dengan mengusung Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu yakni Suparman, S.Sos, M.Si Sebagai Calon Bupati Rokan Hulu dan memenangkannya hingga terpilih menjadi Bupati.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dinamika Konflik Aktor Dalam Perebutan Jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017**

##### **1. Aktor Konflik Dalam Perebutan Jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu**

Peristiwa-peristiwa dan dinamika yang terjadi di partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu, pada dasarnya konflik yang terjadi di DPD II Golkar Kabupaten Rokan Hulu mulai terpecah sejak posisi Ketua Golkar Kosong karena kebetulan Suparman tersandung kasus hukum dan kebetulan juga pada saat itu masa jabtannya sebagai Ketua Golkar Rokan Hulu sudah habis, sehingga jabatan Ketua kosong, dan dari sinilah cikal bakal bermulanya dan terjadinya konflik di partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017, dimana ada beberapa orang yang ingin menggantikan posisi Suparman sebagai Ketua Golkar di Rokan Hulu.

Secara jelas dapat dilihat bahwa konflik terjadi karena adanya perebutan

<sup>20</sup>Andi Harianto Sinulingga.2015.*Pecah Belah Partai Golkar: Dinamika Konflik Golkar Pasca Orde Baru*, Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sejati. hlm. 27

Jabatan Ketua Golkar Rokan Hulu. Oleh karena itu, Kekuasaan merupakan faktor utama dalam melihat sejauh mana sumber-sumber konflik itu terjadi.

## **2. Kepentingan Yang Di Perebutkan Pada Posisi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu**

Konflik yang terjadi di DPD II Golkar Kabupaten Rokan Hulu terjadi karena adanya keinginan yang sama untuk menjadi Ketua Golkar Rokan Hulu, antara Sari Antoni dan Nono Patria Pratama, di kerejakan posisi ketua Golkar Rokan Hulu yang di tinggalkan Suparman sangatlah berpengaruh karena mengingat posisi Partai Golkar sendiri adalah pemenang pemilu ke dua pada Pileg 2014 dan pemenang Pilkada 2015 di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga siapapun yang menjadi Ketua Golkar Rokan Hulu berpeluang besar menjadi Wakil Bupati Rokan Hulu sisa jabatan 2015-2021 karena jabatan Wakil Bupati saat ini kosong di sebabkan Wakil Bupati Sukiman sudah menjadi Bupati menggantikan Suparman dan Siapapun yang menjadi Ketua Golkar mempunyai kesempatan besar menjadi Wakil Bupati karena Golkar adalah partai pendukung dan pengusung Suparman-Sukiman pada pilkada 2015.

### **2.1 Posisi Wakil Bupati Rokan Hulu**

Salah satu alasan mengapa posisi Ketua Golkar menarik dan di perebutkan adalah karena siapapun yang menjadi Ketua Golkar nantinya akan berpengaruh besar dalam menentukan siapa yang akan menjadi wakil bupati Rokan Hulu.

### **2.2 Penentuan Calon Legislatif dan Kursi Pimpinan DPRD Rokan Hulu Untuk 2019**

Posisi pimpinan DPRD rokul dan juga penentuan caleg, itu tidak terlepas dari posisi Ketua partai dalam menentukan ini semua, dikarenakan

posisi ketua atau jabatan ketua partai sangatlah strategis dan berpengaruh.

### **2.3 Mempengaruhi Kebijakan Pemerintahan Di Rokan Hulu**

Melihat posisi Ketua Golkar di Rokan Hulu akan sangat mempengaruhi kebijakan di Rokan Hulu, mengingat partai Golkar di Rokan Hulu adalah partai dengan kursi legislatif terbanyak kedua saat ini dan posisi Wakil Bupati kemungkinan besar juga merupakan orang atau kader Golkar itu sendiri nantinya.

### **2.4 Karir Politik Di Internal Partai Golkar Rokan Hulu**

Karir dalam internal partai politik adalah hak dari setiap anggota dan kadernya, oleh karena itu momentum yang baik dan tepat menjadi salah satu peluang untuk meraih karir yang lebih baik, selain itu kemampuan personal seorang anggota ataupun kader partai untuk meraih karir yang lebih baik dari sebelumnya, harus juga mempunyai tanggung jawab dan kemampuan, agar partai tersebut bisa lebih baik lagi dari sebelumnya.

## **3. Perebutan Posisi Ketua Golkar Rokan Hulu Melalui Musda Di Tempat Dan Waktu Yang Berbeda**

Konflik yang terjadi di DPD II Golkar Kabupaten Rokan Hulu terjadi karena adanya keinginan yang sama untuk menjadi Ketua Golkar Rokan Hulu, antara Sari Antoni dan Nono Patria Pratama, dimana kedua belah pihak sama-sama ingin menjadi Ketua Golkar di Rokan Hulu dengan cara melaksanakan musda dan menghasilkan masing-masing diantara mereka sebagai Ketuanya, dan mereka mencoba mempertahankan posisinya sebagai Ketua melalui musda yang terlaksana di dua tempat dan waktu yang berbeda tersebut, bahwa masing-masing dari mereka berdua yaitu Sari Antoni dan Nono Patria Pratama, sama-sama

mengklaim bahwasanya musda merekalah yang legal dan sah, disinalah konflik tersebut berlasung, dimana saling klaim dan saling mempertahankan posisi sebagai Ketua Golkar Rokan Hulu pun tak terhindarkan lagi Antara Sari Antoni dan Nono Patria Pratama.

#### **4. Dua Kubu Kepemimpinan Golkar Di Rokan Hulu Dan Hadirnya Kembali Suparman Ke Golkar Rokan Hulu Di Tengah Konflik**

##### **4.1 Dua Kubu Kepemimpinan Golkar Di Rokan Hulu**

Dua kubu kepemimpinan partai Golkar di Kabupaten Rokan Hulu ini karena masing-masing ingin jadi Ketua dan masing-masing saling berangapan bahwa mereka adalah Ketuanya, hal inipun diakui oleh Sari Antoni dan Nono Patria Pratama sendiri, ini dapat dilihat pada wawancara penulis dengan informan diatas, bahwa mereka menyadari dua kepemimpinan ini dan masing-masing mereka mengklaim kepemimpinannya sehingga adanya dua kepemimpinan di partai Golkar Rokan Hulu.

##### **4.2 Hadirnya Kembali Suparman Ke Golkar Rokan Hulu Di Tengah Konflik**

kemunculan sosok Suparman di tengah konflik partai Golkar Rokan Hulu saat itu adalah untuk menegahi konflik antara Nono Patria Pratama dan Sari Antoni, dimana dia muncul sebagai penengah dengan mengunda Sari Antoni dan Nono Patria Pratama dalam musyawarah yang di tajah oleh DPD Golkar Riau yang juga dihadiri mahkamah partai, dan Suparman jadi Plt Ketua dan di tugaskan melaksanakan kembali musda, akan tetapi tak lama setelah ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar dan belum sempat

melaksanakan musda, Suparman kembali di tahan oleh KPK.

#### **B. Bentuk Konflik Yang Terjadi Di Internal Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu**

Antara Sari Antoni dan Nono Patria Pratama memiliki keinginan yang sama untuk menjadi Ketua Golkar Rokan Hulu. Ini adalah salah satu konflik kepentingan akan muncul, menurut Ralf Dahrendorf, konflik kepentingan akan muncul dari orang-orang yang ada di tempat yang sama, tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi para elite kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu.<sup>21</sup>

Konflik kepentingan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk konflik permukaan atau konflik yang tidak berwujud pada kekerasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Maswadi Rauf “meskipun terkadang banyak yang berangapan bahwa konflik hanya mencakup konflik fisik, sehingga konflik lisan dalam bentuk debat, polemik, perbedaan pendapat dan lain sebagainya tidak dapat disebut sebagai konflik. Namun konflik lisan sudah jelas dapat dikategorikan sebagai konflik, hal ini dikarenakan sudah ada terjadi pertentangan di dalamnya meskipun tindakan kekerasan yang melibatkan benda-benda fisik belum terjadi”<sup>22</sup>.

#### **C. Penyelesaian Konflik DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu**

konflik yang terjadi diselesaikan dengan cara atau teknik Non Zero Sum Game, Penyelesaian konflik dengan

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto.2013,*Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta:Rajawali Press.hlm 111

<sup>22</sup> Maswadi Rauf.2000.*konsensus politik: Sebuah Penjagaan Teoritis*.Jakarta:Dirjen Dikti Depdiknas.hlm 2

cara Non Zero Sum Game adalah menggunakan teknik yang sama-sama bersifat menguntungkan, dimana pihak-pihak yang bertikai atau berkonflik menyelesaikan konfliknya dengan cara saling menguntungkan, namun dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat terlebih dahulu mengadakan sebuah kompromi agar mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan diantara pihak-pihak yang terlibat. Cara atau teknik Non Zero Sum Game inilah yang digunakan dalam penyelesaian konflik Partai Golkar Di Kabupaten Rokan Hulu, dimana pihak yang berkonflik yaitu Nono Patria Pratama dan Sari Antoni menyelesaikan konfliknya dengan cara kompromi sebelum Musda di Hotel Pangeran. Dimana mereka bersepakat bahwa Sari Antoni sebagai Ketua dan Nono Patria Pratama sebagai Sekretaris.

Melihat dari penyelesaian konflik diatas dengan saling menguntungkan dan berkompromi antara pihak yang berkonflik, maka penulis berangapan bahwa penyelesaian konflik Golkar berbanding lurus dengan teknik penyelesaian Non Zero Sum Game.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Partai politik sebagai wadah tempat bernaungnya dan bertemunya berbagai kepentingan sudah barang tentu rawan terjadinya konflik. Partai politik sebagai organisasi modern yang selalu dihadapkan pada realita konflik. Misalnya saja konflik yang berupa perbedaan pandangan, ide, paham, pertentangan kepentingan dan lain-lain. Partai Golkar di Kabupaten Rokan Hulu adalah partai yang besar dan berpengaruh karena merupakan partai yang banyak mendapatkan kursi di

legislatif pada tahun 2014 dan menempatkan kadernya pada salah kursi pimpinan DPRD Rokan Hulu, selain itu Partai Golkar juga merupakan partai pemenang Pilkada pada tahun 2015 di Rokan Hulu dan mengantarkan kadernya menjadi Bupati.

Namun dalam perjalannya Ketua partai Golkar DPD II Rokan Hulu Suparman yang juga merupakan Bupati Rokan Hulu tersandung masalah hukum sehingga terjadi kekosongan posisi Ketua DPD II partai Golkar di Kabupaten Rokan Hulu. Disisi lain tersandungnya Suparman masalah hukum akan membuat posisi Bupati Rokan Hulu yang di jabat Suparman akan digantikan oleh wakilnya dan posisi Wakil Bupati besar kemungkinan akan diisi oleh kader Golkar, sehingga posisi Ketua Golkar Rokan Hulu sangatlah strategis. Inilah awal mula terjadinya konflik di DPD II partai Golkar Kabupaten Rokn Hulu. Karena itu penulis menyimpulkan bahwa :

Aktor didalam konflik internal DPD II Partai Golkar Rokan Hulu adalah Sari Antoni dan Nono Patria Pratama. Tersandungnya Suparman dalam masalah hukum RAPBD dan ditahan oleh KPK yang kebetulan juga merupakan Ketua DPD II partai Golkar Rokan Hulu, membuat kekosongan pada pimpinan partai Golkar di Rokan Hulu, apa lagi mengingat periode jabatan Suparman juga sudah berakhir sebagai Ketua partai Golkar Rokan Hulu bersamaan di saat ia tersandung kasus hukum tersebut. Hingga beberapa kader Golkar Rokan Hulu seperti Sari Antoni dan Nono Patria pratama menganggap harus ada pengisian Ketua Golkar di Rokan Hulu untuk menggantikan Suparman. Selanjutnya rencana pergantian Suparmana sebagai Ketua Golkar Kabupaten Rokan Hulu tidak di komunikasikan dengan baik antara sesama kader Golkar di tingkat

Kabupaten salah satunya antara Sari Antoni dan Nono Patria Pratama, sehingga terjadilah kesalah pahaman dan kurangnya komunikasi antara Sari Antoni dan Nono Patria Pratama, sehingga terjadilah musda di tempat dan waktu yang berlainan dan masing-masing musda mehirkan Ketua yang berbeda pula, sehingga saling klaim dan mempertahankan posisi masing-masing sebagai Ketua Golkar Rokan Hulu tak terhindarkan antara Sari Antoni dan Nono Patria Pratama. Konflik yang terjadi di DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu antara Sari Antoni dan Nono Patria Pratama termasuk kedalam konflik permukaan karena konflik ini hanya memiliki akar dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya kesalahpahaman mengenai sasaran dan tujuan untuk menjadi Ketua Golkar dan konflik ini tidak menggunakan benda-benda fisik dan kekerasan dan dapat diatasi dengan menggunakan atau meningkatkan komunikasi dalam penyelesaiannya. Konflik yang terjadi di dalam internal DPD II partai Golkar Rokan Hulu antara Sari Antoni dan Nono Patria Pratama, diselesaikan dengan cara atau teknik Non Zero Sum Game, Penyelesaian konflik dengan cara Non Zero Sum Game adalah menggunakan teknik yang sama-sama bersifat menguntungkan, dimana pihak-pihak yang bertikai atau berkonflik menyelesaikan konfliknya dengan cara saling menguntungkan, namun dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat terlebih dahulu mengadakan sebuah kompromi agar mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan diantara pihak-pihak yang terlibat. Cara atau teknik Non Zero Sum Game inilah yang digunakan dalam penyelesaian konflik Partai Golkar Di Kabupaten Rokan Hulu, dimana pihak yang berkonflik yaitu Nono Patria Pratama dan Sari

Antoni menyelesaikan konfliknya dengan cara kompromi sebelum Musda di Hotel Pangeran. Dimana mereka bersepakat bahwa Sari Antoni sebagai Ketua dan Nono Patria Pratama sebagai Sekretaris.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa terjadinya konflik di internal partai Golkar Kabupan Rokan Hulu akibat tidak adanya komunikasi yang kuat antara pengurus di tingkat Kabupaten sehinggal menghasilkan konflik dalam mentukan hal-hal yang dianggap strategis dan menghasilkan konflik. Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa saran yang dianggap penting untuk penulis sampaikan yaitu:

1. Untuk kedepannya DPD II partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu, jika tidak ingin kembali terjadinya konflik karena perbedaan pandangan, kepentingan, pengisian jabatan struktural ataupun jabatan-jabatan tertentu yang dianggap strategis, maka internal DPD II partai Golkar perlu melakukan komunikasi yang baik dan kuat antara sesama kader dan pengurus agar bisa duduk bersama dan mencari jalan terbaik ataupun jalan tengah agar konflik dapat diminimalisir.
2. DPD I Golkar Riau Perlu cepat dalam merespon dan mengantisipasi apabila DPD II yaitu tingkat Kabupaten/Kota terjadi kekosongan posisi Ketuanya, agar bisa segera dilakukan musda untuk memilih Ketua yang baru yang sesuai aturan dan mekanisme AD/ART yang berlaku di partai Golkar itu sendiri.
3. Hendaknya kader Golkar di DPD II Rokan Hulu selalu menjaga semangat dalam membesarkan partai ini secara bersama-sama dan meningkatkan komunikasi yang baik antara sesama kader, tak kalah pentingnya adalah

mendahulukan kepentingan partai dari pada kepentingan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pranada Media Grup

Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Halid, Nurdin. 2016. *Suara Golkar Suara Rakyat*. Jakarta: Jetpress

Hidayat, Denny, dkk. 2005. *Manajemen Konflik (Stakeholders Delta Mahakam)*. Jakarta: Dany Jaya Abadi

Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Pruit Dean G, dan Rubin Jeffrey z. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus Politik: Sebuah Penjaga Teoritis*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.

Rusdiana, H.A. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA

Sahidin, 2004. *Kala Demokrasi Melahirkan Anarki: Potret Poilitik Di Dongos*. Jokjakarta: DOGUNG PUSTAKA

Sinulingga, Harianto, Andi. (2015). *Pecah Belah Partai Golkar (Dinamika Konflik Golkar Pasca Orde Baru)*. Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sejati

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia

Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Soekanto, Soerjono. 2013. *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Tandjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way (Survival Partai di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

### c. Jurnal

Jurnal Online Mahasiswa Fisip, Maya friscilia 2017 Volume 4, No. 2, tentang “Dinamika Konflik Partai Golongan Karya (GOLKAR) Tahun 2013-2015 Di Provinsi Riau”

Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Deny Rendra dan Hery Suryadi. Volume 10, No. 2, Desember 2012 Tentang “Dinamika Pergeseran Kekuasaan Politik di DPD Partai Demokrat Provinsi Riau”.

Jurnal Sosial dan Politik, Vol 18 No. 2 tahun 2008, Suswanto tentang “Pola Konflik Partai Persatuan Pembangunan dan Relasi Konfliknya Dengan Negara di Era Orde Baru dan Reformasi”

Jurnal Online Mahasiswa Fisip, Nella Regar 2016 Volume 3, No. 1, tentang “Konflik Antara Masyarakat Dengan PT. Inti Kampar Indo Sejahtera”

### d. Skripsi

Maya friscilia.2017.Dinamika Konflik Partai Golongan Karya (GOLKAR) Tahun 2013-2015 Di Provinsi Riau.

**e. Website**

<http://blogdwi19.blogspot.co.id/2015/01/dinamika-konflik-dalam-organisasi.html?m=1>

<http://eprints.uny.ac.id/9882/3/BAB%20%20-%2008104241005.pdf>

<http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=109234&judul=Tersangka-suap-APBD-Riau-Suparman-Ditahan-KPK-dan-Johar-masih-Diperiksa>

<http://news.okezone.com/read/2017/05/17/340/1693343/divonis-bebas-korupsi-mendagri-aktifkan-lagi-suparman-sebagai-bupati-rokan-hulu>

<http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=117207&judul=sempat-ricuh-sari-antoni-Terpilih-Aklamasi-sebagai-Ketua-Golkar-Rohul>

<http://rohultoday.co./news/melalui-musda-iv-nono-patria-pratama-terpilih-aklamasi-jadi-ketua-partai-golkar-rohul.html>

<http://riauterkini.com/politik.php?arr=127581&judul=Musda%20Ulang%20Golkar%20Rohul%20Buntu%20,%20Suparman%20Di tunjuk%20Jad%20Plt>

<http://rohultoday.co/berita/detail/terpilih-aklamasi-sari-antoni-pimpin-partai-golkar-rohul#>

<http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=117207&judul=sempat-ricuh-sari-antoni-Terpilih-Aklamasi-sebagai-Ketua-Golkar-Rohul>

[http://avivsyuhada.wordpress.com/2012/02/23/fungsi-partai-politik/.](http://avivsyuhada.wordpress.com/2012/02/23/fungsi-partai-politik/)

[http://mandayuanita-fisip12.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-](http://mandayuanita-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-)

[95050-Negosiasi-20% dan20% Diplomasi-Teori20%Negosiasi.html.](95050-Negosiasi-20% dan20% Diplomasi-Teori20%Negosiasi.html)

[http://googleweblight.com/i?u=http://gigihu zaman.wordpress.com/2011/07/23/defenisi-zerosum-game/&hl=id-ID.](http://googleweblight.com/i?u=http://gigihu zaman.wordpress.com/2011/07/23/defenisi-zerosum-game/&hl=id-ID)